

BAB II

KETERKAITAN ELIT BIROKRASI DI INDUSTRI OTOMOTIF DAN KEKUATAN PEMERINTAH DALAM MENGINTERVENSI KEBIJAKANNYA DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membagi menjadi 2 bagian yaitu konsep *Developmental Elite* melihat bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan industri otomotifnya dan keterkaitan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam membantu melancarkan industri otomotif, dan bagaimana *relative autonomy* dalam intervensi pemerintah terhadap industri otomotif dan intervensinya dalam perdagangan internasional untuk dapat meningkatkan produk-produk unggulan Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri serta melihat bagaimana Indonesia dalam meningkatkan standarnya menjadi standar internasional dari segi kualitas, keamanan, dll.

2.1 The Developmental Elite

Developmental Elite menjelaskan bagaimana adanya keterkaitan elit birokrasi dalam menentukan arah kebijakan yang di keluarkan pemerintah terhadap industri otomotif di Indonesia. Elit-elit birokrasi yang memiliki keterkaitan terhadap industri otomotif pada masa pemerintahan Joko Widodo tidak terlepas dari rangkaian bisnis dan politik sehingga memiliki kepentingan

terhadap industri otomotif. Namun adanya hubungan yang kuat antara pemerintah dengan elit-elitnya mampu melihat bagaimana strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- **Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan Industri Otomotif Nasional**

Dalam mendorong perkembangan pembangunan terhadap sektor industri otomotif dan meningkatkan ekonomi negara pemerintah melakukan upaya-upaya untuk melancarkan sektor-sektor tersebut dengan berbagai kebijakan dan kerja sama, di mana pemerintah menempatkan posisinya untuk ikut serta dalam memajukan sebuah negara seperti bekerja sama dengan berbagai pihak seperti menteri, dan pihak swasta, peran pemerintah dalam menjalankan kebijakannya merupakan aktor utama untuk bisa membantu pihak-pihak lain dalam menjalankan sektor-sektor yang mereka jalankan. Untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam membantu sebuah negara dilihat melalui strategi yang mampu mendorong pihak-pihak lain untuk terus membangun inovasi, investasi, maupun masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya.

Pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo merupakan pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif dalam pemerintahannya, di mana pemerintah dalam menjalankan tugasnya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan pembangunan dan strategi ekonomi yang terarah, pemerintah juga memberikan tugas terhadap elit-elit birokrasinya, pihak swasta

maupun masyarakat untuk dapat membangun negara bersama-sama. Pemerintah yang memiliki *power* di sebuah negara mampu memberi kebijakan untuk mengarahkan negara tersebut untuk bergerak sesuai dengan arah pembangunan yang di inginkan, seperti dalam industri otomotif pemimpin pemerintahan saat ini yaitu Presiden Joko Widodo berusaha dalam mengarahkan industri otomotifnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain dengan memberikan kebijakan yang terarah dalam perkembangan industri otomotif saat ini bersama dengan elit birokrasinya.

Sebelum menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo merupakan salah satu Wali Kota Solo yang menjabat selama dua periode, di mana dalam masa kepemimpinannya turut serta dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, budaya, pendidikan, serta salah satunya berada di industri otomotif yaitu Esemka, Presiden Joko Widodo memperjuangkan mobil tersebut menjadi mobil nasional, mobil Esemka ini merupakan mobil buatan Indonesia yaitu PT. Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di mana mesin dan desainnya merupakan karya anak SMK dan komponennya 80% dibuat oleh industri-industri kecil, sehingga ketika Joko Widodo menjabat sebagai Presiden untuk dapat meningkatkan produksi dan menjadikan mobil nasional buatan Indonesia pada tahun 2014 mobil Esmeka menjalin kerja sama dengan PT. Adiperkasa Citra Lestari (ACL) yang dimiliki oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara yaitu Abdullah Makhmud Hendropiyono hal ini merupakan dukungan Presiden Joko Widodo

terhadap industri otomotif Indonesia. Semenjak menjadi Wali Kota Solo Joko Widodo sudah mampu meningkatkan industri otomotif kota Solo menjadi mobil nasional serta mobil dinas, dimana ia telah mendukung berkembangnya industri otomotif Indonesia (Quraisyi, Marjono, & Soepeno, 2017, pp. 193-194).

Mobil Esemka merupakan mobil buatan Indonesia yang memiliki standar Internasional di mana dalam pembuatannya melibatkan 33 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) serta memiliki harga yang murah untuk model transportasi perkotaan, sehingga mampu membuat masyarakat yang memiliki pendapatan menengah kebawah membeli mobil tersebut, dalam pengembangan mobil Esemka ini mampu memberikan masyarakat terhadap pendidikan dan inovasi khususnya dalam bidang transfer teknologi hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberhasilan dalam menciptakan teknologi, dalam meningkatkan industri otomotif tersebut juga tidak terlepas dari adanya aktor-aktor yang terlibat seperti pihak swasta, instansi pemerintahan seperti politikus dan menteri yang membantu pengembangan otomotif Indonesia.

Presiden Joko Widodo dalam jabatannya bersama dengan menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan GAIKINDO, mampu mendorong industri otomotif Indonesia untuk memasarkan produknya ke dalam negeri, GAIKINDO (Gabungan Industri Otomotif Indonesia) juga bergabung bersama

pemerintah dalam promosi di bidang industri otomotif salah satunya dalam acara internasional yaitu GIIAS dan IIMS di mana dalam acara ini menampilkan mobil-mobil dengan teknologi modern yang mampu meningkatkan inspirasi masyarakat terhadap perkembangan dunia otomotif serta melakukan ekspor ke berbagai negara (Siregar, 2019). Pemerintah bersama dengan menteri-menterinya mampu mengembangkan industri 4.0. yaitu industri kimia, tekstil, makanan dan minuman, elektronik, dan salah satunya adalah industri otomotif, yang dalam ekspornya sudah tinggi dan memiliki teknologi yang modern, strategi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mampu membuka akses pasar yang lebih besar terhadap dunia Internasional.

Presiden Joko Widodo mendukung para pelaku bisnis dalam meningkatkan penjualan mereka salah satunya dalam bidang industri otomotif melalui kebijakan yang dikeluarkan dan dukungan melalui intensif yang mampu mempermudah industri otomotif dalam investasi, ekspor dan menurunkan impor, sebab industri otomotif sendiri merupakan pionir dari industri-industri yang ada di Indonesia serta menjadi industri penyumbang PDB terhadap negara dan menteri perindustrian sangat aktif untuk mendorong peningkatan usaha, investasi, transfer teknologi (kemenperin, 2019).

Awal tahun 2018 Indonesia memiliki masalah terhadap pengeksporan mobil ke negara Vietnam, dimana hal tersebut terhambat dikarenakan adanya

regulasi baru yang di keluarkan oleh Vietnam mengenai sertifikasi *Vehicle Type Approval (VTA)* untuk mobil bertipe *Completely Build Up (CBU)* dimana aturan tersebut diatur dalam *Decree No. 116/2017* dan *Circular No. 03/2018*. Kebijakan tersebut mengancam industri otomotif Indonesia yang mana membuat Presiden Joko Widodo merespon permasalahan tersebut dalam pertemuan bersama perdana menteri Vietnam yaitu Nguyen Xuan Phuc pada acara *IMF-World Bank Annual Meeting* dalam pembahasan penegakan hukum *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* dan salah satunya adalah penghambatan ekspor mobil Indonesia ke Vietnam, dalam hal tersebut pemerintah Indonesia meminta agar ekspor mobil dari Indonesia dipermudah sehingga dalam kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam yang sudah terjalin sejak lama kembali harmonis, Presiden Joko Widodo meminta PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc untuk mengatur kembali persyaratan manufaktur perakitan, dan mobil utuh (CBU) yang dikirimkan ke Vietnam, dalam negosiasi atau pendekatan persuasif ini PM Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan masalah tersebut selama dua bulan dan akan melakukan pertemuan ulang di Vietnam (CNN, 2018).

Mengenai ekspor mobil yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Vietnam telah mengalami hambatan. Maka dengan hal ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keluhan kepada pemerintah Vietnam. Sebab Vietnam sendiri telah menerapkan regulasi yang membuat kendaraan yang

diimpor dari Indonesia tidak bisa ditransaksikan di Vietnam sendiri. oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan hambatan ekspor kepada pemerintah Vietnam yang mana dari hal tersebut Presiden Joko Widodo memastikan dukungannya terhadap industri otomotif ini dapat terus bersaing (Daud, 2018).

- **Tokoh Menteri, dan politisi**

Dalam menjalankan pemerintahannya Presiden Joko Widodo dibantu dengan tokoh-tokoh menteri yang berkaitan erat dengan politisi dan pebisnis untuk dapat memasuki ranah politik dan ekonomi Indonesia guna meningkatkan pendapatan, tokoh-tokoh tersebut merupakan orang yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahannya hal ini pun bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja kerja yang efisien, dan akuntabel. Dalam kabinetnya agar memudahkan arah kebijakan sehingga sejalan, Presiden Joko Widodo memilih orang-orang terdekatnya seperti Rini Mariani Soemarno yang dipilih sebagai menteri BUMN periode 2014-2019. Di mana sebelum menjabat sebagai menteri, Rini Soemarno memiliki pengalaman dalam menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Astra Internasional, lalu PT. Semesta Citra Motorindo, PT. Agrakom, dan PT. Kanzen Motor Indonesia (Viva, 2019). Presiden Joko Widodo dengan Rini Soemarno sudah memiliki kedekatan secara politik dan ekonomi bahkan ketika Joko Widodo sendiri masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, kedekatan antara

pemerintah dengan tokoh pejabat lainnya yang memiliki peran di dua sisi yang berbeda ini memiliki hubungan yang erat untuk dapat membuat negara Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain. Keterkaitan pemerintah dengan orang-orang yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo, serta pebisnis yang memiliki kedekatan dengan pemerintah mampu membuat kebijakan yang sejalan dengan visi misi Indonesia kedepannya dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo memiliki peran dan pengaruh masing-masing dalam meningkatkan bidang yang mereka pimpin di mana kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan banyak memiliki pertentangan dalam struktur pemerintahan dalam negeri karena adanya kepentingan politik yang berbeda, namun dalam hal ini tokoh-tokoh tersebut mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik dengan program yang mereka keluarkan seperti dalam kasus terhambatnya ekspor mobil ke Vietnam. Di mana menteri perindustrian bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berkoordinasi dengan menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri luar negeri, serta GAIKINDO untuk dapat mengkaji ulang SNI yang tidak sesuai dengan kriteria standar Vietnam yang mana hal ini mengakibatkan menurunnya angka penjualan mobil buatan Indonesia ke Vietnam (Jannah, 2018). Menteri-menteri yang menjadi wakil Indonesia terus melakukan komunikasi dengan otoritas Vietnam dalam menangani kasus yang

merugikan Indonesia sehingga permasalahan tersebut mendapatkan titik terang dan akses pasar ekspor mobil Indonesia kembali normal.

Menteri atau aktor elit memiliki kewenangan dan kepentingan terkait masalah yang akan dihadapi dalam membantu Presiden dengan menempatkan posisi yang tepat dalam kabinetnya serta memiliki nilai yang sejalan dengan pemerintahan. Di mana menteri tersebut harus mampu menjaga hubungan antara sesama menteri maupun Presiden (Isra, 2016). Mengenai respon kebijakan terhadap *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* yang telah dikeluarkan otoritas Vietnam, peran menteri dalam hal ini memiliki kewenangan dan kepentingan dalam membantu tugas pemerintah untuk menindak lanjuti terhambatnya ekspor otomotif Indonesia sebab dalam meningkatkan industri otomotif kepentingan dari menteri terkait untuk menyikapi masalah tersebut sangat diperlukan untuk melanjutkan ekspor mobil Indonesia ke Vietnam karena banyaknya mobil-mobil Indonesia yang telah di ekspor ke Vietnam.

Peran menteri dalam menghadapi hambatan di bidang industri otomotif memiliki pengaruh yang begitu besar, sebab rancangan yang dikeluarkan oleh Presiden akan dikaji oleh menteri-menteri yang bersangkutan sehingga menciptakan peran yang signifikan terhadap strategi yang akan di jalankan. Dalam hambatan ekspor mobil ke Vietnam, kementerian perindustrian yang telah berkoordinasi dengan menteri-menteri lainnya memilih melakukan

pendekatan secara damai atau negosiasi dengan Vietnam guna menjaga stabilitas kedua negara. Kementerian yang turut andil dalam permasalahan ini menginginkan ekonomi Indonesia terus berjalan dalam melakukan perdagangan terhadap industri otomotif sehingga pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dukungannya terhadap industri otomotif terus berjalan tanpa adanya kendala dari kerjasama bilateral antara Indonesia-Vietnam. Peran menteri dalam hal ini sangat menentukan bagaimana arah tujuan perdagangan internasional khususnya dalam bidang ekspor mobil untuk terus bergerak cepat dalam melakukan dukungan yang signifikan terhadap industri otomotif sehingga dapat menyesuaikan kebijakan dan aturan-aturan yang baru terkait masalah terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam (Investments, 2018).

Dengan demikian, Kesenambungan antara pemerintah dengan tokoh-tokoh seperti menteri, dan politisi untuk dapat melancarkan kendala maupun visi dan misi Indonesia kedepannya dalam melakukan pembangunan negara, di mana pemerintah yaitu Presiden Joko Widodo yang memiliki *power* dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh terkait seperti Rini Soemarno dan pihak swasta yaitu GAIKINDO memiliki keterkaitan yang erat dalam menjakankan politik dan ekonomi. Dalam pemerintahan era Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri yang ditunjuk langsung merupakan bukti bahwa adanya keterkaitan politik yang berlangsung dalam pemerintahannya serta orang-orang

terdekat yang dipilih merupakan tim sukses dalam menjalankan roda pemerintahan meskipun adanya perbedaan politik dari kalangan lain.

Strategi pemerintah dalam menghadapi hambatan ekspor mobil ke Vietnam membuat kebijakan melalui intensif yang diberikan pada menteri-menterinya untuk membuat keputusan. Pemerintah yang telah berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait dapat menyiapkan data-data pendukung dalam memproteksi sehingga mampu menyelesaikan masalah tersebut. Adanya kerja sama tersebut merupakan sarana dan prasarana penunjang pasar untuk mendorong ekspor industri otomotif dan dari kekuatan tersebut mampu menstabilkan pasar sehingga berjalan dengan baik.

Adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan elit birokrasinya seperti menteri, sektor swasta dan organisasi merupakan ciri penting dari keberhasilan dalam meningkatkan ekonomi. Melihat bagaimana Presiden Joko Widodo yang telah bekerja sama dengan menteri-menterinya yaitu menteri perindustrian, menteri perhubungan, menteri perdagangan, menteri luar negeri, dan GAIKINDO memberikan hasil yang optimal untuk menyelesaikan masalah hambatan ekspor mobil ke Vietnam. Di mana pemerintah Vietnam telah merespon negosiasi yang di berikan oleh Indonesia dan akan menyelesaikan masalahnya dalam dua bulan. Hubungan yang erat antara pemerintah dengan aktor-aktor elit di Indonesia mampu menunjukkan kerja sama yang baik dalam melindungi pasar khususnya di bidang industri otomotif.

Pemerintah dan tokoh-tokoh tersebut bekerja sama dalam meningkatkan industri otomotif dalam segi keamanan dan kualitas untuk produk-produknya dengan menyesuaikan kebijakan dan regulasi. Dalam hal ini menggambarkan bagaimana keterkaitan antara pemerintah dan tokoh-tokoh yang bersangkutan mampu menunjukkan bahwa liberalisasi yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mempunyai pengaruh yang signifikan untuk mengatasi masalah terhambatnya ekspor mobil ke Vietnam.

Melihat permasalahan antara Indonesia-Vietnam mengenai terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam terkait *Decree No.116/2017* dan *Circular No.03/2018* membuat pemerintah Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo melakukan pendekatan secara persuasif agar kerjasama yang terjalin tetap terjaga. Di dalam permasalahan ini pemerintah mampu membuat strategi dan mengidentifikasi masalah sehingga dapat menentukan tindakan yang tepat untuk menentukan peluang dalam melaksanakan langkah kedepannya. Pemerintah juga mampu mendukung arah kepentingan nasional dengan melakukan pendekatan intensif terhadap elit birokrasi yang terhubung kepada pemerintahan pusat serta pihak swasta dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk dapat bersama-sama dalam melakukan pembangunan ekonomi negara.

2.2 Relative Autonomy of the Developmental State

Otonomi relatif memberikan kewenangan pemerintah dalam mengatur ekonomi dan politik di mana pemerintah dalam melakukan birokrasinya perlu adanya keterkaitan dengan pihak-pihak yang ada dalam struktur pemerintahan tersebut dalam menjalankan suatu negara. Selain itu pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan pihak swasta, dan elitnya dalam menjalankan kerjasama, maupun masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya. Indonesia dalam masa kepemimpinan Joko Widodo memiliki kewenangan dalam mengatur birokrasinya namun hal tersebut memiliki batasan sehingga melakukan intensif terhadap kebijakannya dan di bantu elit birokrasinya dalam menentukan arah kebijakan.

- **Kapabilitas Intervensi Pemerintah Dalam Industri Otomotif Indonesia**

Dalam otonomi relatif ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi di mana Presiden merupakan kepala negara yang dibawah oleh UUD 1945, dalam merumuskan suatu kebijakan Presiden memerlukan persetujuan dari para menteri dan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, dan partai politik yang bersangkutan, namun dalam hal ini adanya perbedaan dan kepentingan politik setiap kelompok menghambat proses birokrasi yang berjalan sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga Presiden memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengatur industri otomotif, agar

dapat mempercepat proses birokrasinya Presiden memanfaatkan proses intensif terhadap bidang-bidang yang ingin di tingkatkan.

Industri otomotif pada masa pemerintahan Joko Widodo merupakan industri yang menjanjikan sebab dari industri otomotif mampu menyumbang ekonomi yang sangat besar terhadap negara Indonesia, pemerintah era Presiden Joko Widodo dalam industri otomotif berusaha meningkatkan penjualan dalam negeri maupun luar negeri, selain itu pemerintah juga berusaha dalam menekan impor, dan berusaha membantu industri otomotif dalam negeri bersama Menteri Perindustrian, menteri perdagangan, dan menteri keuangan, dimana pemerintah berusaha membuat kebijakan dalam menurunkan pajak seperti :

1. Tax Allowance

Dalam upaya menarik investor pemerintah membuat kebijakan dalam pajaknya salah satunya Adalah keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang dikenal dengan nama *Tax Allowance* perusahaan akan diberikan keringanan pajak (PPh) berdasarkan dalam jumlah investasinya sehingga pengurangan pajak tersebut berdasarkan penghasilan neto tertinggi 30% dari jumlah investasi yang telah dibebankan selama 6 tahun dimana pertahunnya akan dikurangi 5% hal ini telah diatur dalam kebijakna Nomor 89/PMK.010/2015, peringanan pajak ini akan menjadi prioritas pemerintah jika industri tersebut merupakan industri yang bernilai tinggi di nasional, dan mampu

menyerap tenaga kerja minimal 300 orang dan melakukan investasi minimal Rp. 50 miliar.

2. Tax Holiday

Pada penghilangan pajak sementara untuk pajak penghasilan (PPh) yang diberikan kepada perusahaan dengan jangka waktu 5-20 tahun yang tertuang dalam kebijakan Nomor 35/PMK.010/2018 bagi perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia sehingga mampu meningkatkan ekonomi (PDB) *Tax Holiday* ini akan diberikan kepada perusahaan asing jika nilai investasinya tinggi maka penghilangan pajak tersebut juga akan sangat lama, hal ini mencakup segala bidang industri salah satunya adalah bidang otomotif (Keuangan, 2018).

3. Super Deductible Tax

Merupakan pengurangan pajak penghasilan (PPh) terhadap industri lokal yang melakukan kegiatan pengembangan, penelitian, dan pendidikan agar terus memberikan inovasi, investasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana industri lokal yang terlibat terutama yang melakukan ekspor seperti yang tertuang dalam revolusi 4.0 akan diberikan pengurangan wajib pajak hingga 300 persen terhadap industri lokal yang melakukan pengembangan tertentu maupun penelitian di Indonesia, dan terhadap industri yang memberikan fasilitas magang, dan pendidikan,

sehingga industri yang terlibat akan mengurangi beban dalam pembayaran badan usahanya (Setiawan, 2019).

Contohnya seperti perusahaan yang sedang memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap alat-alat industri bersama dengan pihak yang bekerjasama seperti SMK dan menghabiskan total Rp. 1 miliar pemerintah akan mengurangi wajib pajak (WP) sebesar Rp. 2 miliar, hal ini bertujuan agar mampu menunjang sumber daya manusia, dan jika industri tersebut sedang membangun pusat riset (R&D) senilai Rp. 1 miliar pemerintah akan memberikan pengurangan pajak senilai Rp. 3 miliar selama 5 tahun, perusahaan yang terlibat juga akan di lihat dalam *Assessment* industri tersebut, hal ini bertujuan agar Indonesia mampu mempersiapkan SDM dan produk yang memiliki daya saing, meningkatkan ekspor, yang dapat memperbesar ekonomi nasional serta masuk kedalam jajaran 10 negara ekonomi yang kuat pada tahun 2030 (Kemenperin, 2019).

Pemerintah bersama dengan menteri keuangan memberikan kebijakan berupa kenaikan tarif bea masuk atau impor terhadap barang-barang yang sudah mampu di produksi oleh industri lokal seperti yang tertuang dalam aturan Nomor 132/PMK.010/2015, dalam peraturan tersebut mampu membuat industri lokal bersaing dan bertahan dari adanya produk-produk luar negeri. Hal ini mampu membuat industri-industri lokal meningkatkan produksi kandungan

lokal mereka sebab adanya kenaikan harga barang-barang impor ini membuat produk Indonesia lebih murah dan memiliki kualitas yang sama (Idris, 2015).

Untuk melindungi industri otomotifnya selain membatasi banyaknya barang-barang impor Presiden Joko Widodo menekankan kembali kebijakan terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan bukan barang kebutuhan pokok hal tersebut telah tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang No.42 Tahun 2009 di mana tarif tersebut ditetapkan paling rendah 10-200%, hal ini diatur agar masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki keseimbangan untuk mengendalikan pola konsumsi dan memberikan perlindungan terhadap produsen kecil (Pajak, 2016). Mobil-mobil yang terkena pajak PPnBM akan dilihat dari segi emisi gas buang dan meliputi *Low Cost Green Car* (LCGC) sehingga mampu mendukung kemajuan industri otomotif Indonesia.

Low Cost Green Car (LCGC) merupakan sebuah program yang mengharuskan mobil-mobil di Indonesia memiliki mesin yang ramah lingkungan, hemat energi, hemat bahan bakar, dan berharga murah di mana mobil tersebut memiliki kapasitas mesin maksimal 1.200 cc, program tersebut merupakan program yang diberikan pemerintah dalam menjaga lingkungan serta menurunkan penggunaan BBM. Dalam hal ini pemerintah bertujuan untuk dapat meningkatkan industri otomotif Indonesia dengan teknologi yang tidak monoton di mana hal ini diharapkan pemerintah bahwa industri otomotif

mampu berinovasi dalam menciptakan teknologi terhadap komponen-komponennya tentunya komponen tersebut merupakan komponen buatan pabrik Indonesia. Di sisi lain dengan adanya program tersebut menimbulkan banyaknya komponen yang harus dipakai sehingga pabrik juga harus menyediakan stok komponen yang banyak sehingga akan memerlukan banyak tenaga kerja dan akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga akan berdampak baik bagi negara dengan adanya penyamarataan ekonomi dan peningkatan di sektor perekonomian negara (perindustrian, 2019).

- **Kemampuan Intervensi Pemerintah Terkait Perdagangan Internasional**

Dalam menjaga keamanan terhadap perdagangan internasional pemerintah perlu melakukan sinergitas dengan berbagai pihak untuk melakukan penyesuaian regulasi dan mengatur standar produk terhadap perdagangan internasional. Selain kebijakan PPnBM yang telah direalisasikan untuk menjaga kestabilan dalam ekspor dan impor, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan penggunaan produk lokal yang telah memiliki standar SNI.

Kebijakan tersebut berlaku bagi investor yang ada di Indonesia seperti yang telah di atur dalam Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di mana 80% harus menggunakan kandungan lokal, namun hingga saat ini TKDN hanya diberlakukan pada mobil penumpang yang memiliki program LCGC yang telah diatur dalam peraturan menteri perindustrian Nomor: 16/M-

IND/PER/2/2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri (kemenhumkam, 2011).

Adapun kebijakan nasional Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan nilai perdagangan Indonesia bersama dengan menteri perhubungan adalah meningkatkan daya saing serta mengembangkan infrastruktur seperti memperbesar pelabuhan, airport, jalan tol, dan jalur kereta api. Sehingga jika infrastruktur memadai dapat membantu produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar global dan juga terdapat program kebijakan yang mampu ditingkatkan pemerintah seperti pariwisata, daya beli masyarakat, logistik, dan investasi, bersama dengan menteri koordinator bidang perekonomian (Parikesit, Purwoto, Soemardjito, & Susilo, 2019).

Dalam menghadapi perdagangan bebas dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) serta persaingan yang ketat di wilayah ASEAN, Indonesia berupaya memberikan kualitas industri otomotif yang mampu bersaing dan mengejar ketertinggalan dari negara lain sebab industri otomotif Indonesia sudah berskala internasional dari produksi, branding, dan rantai pemasokan.

Hingga saat ini Indonesia banyak memiliki pabrik industri otomotif di mana pabrik-pabrik tersebut sudah memiliki teknologi yang modern untuk bisa mengisi pasar domestik dan memenuhi permintaan luar negeri.

Pemerintah yang telah berkoordinasi dengan kementerian perindustrian dan menteri perdagangan untuk melindungi industri lokal mengupayakan

peningkatan untuk di beberapa sektor. Dari tingkat regional ASEAN terdapat rencana MEA yang mampu meningkatkan perdagangan internasional antar negara anggotanya, dalam industri otomotifnya sendiri Indonesia yang telah siap dalam menghadapi MEA tersebut memberikan beberapa regulasi yang dapat mengamankan perdagangan internasionalnya seperti dalam meningkatkan tarif terhadap barang impor, dan pengetatan regulasi impor.

Pemerintah dalam menjaga konsumennya telah membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi melalui peraturan menteri perdagangan No.57 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, perlindungan konsumen, dan meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan Indonesia (Malau, 2014, pp. 173-179). Pemerintah juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti organisasi internasional WTO dalam melakukan perjanjian internasional dalam melindungi produk dan standar produk dari segi keamanan dan kualitasnya, dalam kesepakatan tersebut Indonesia dan WTO memiliki kepentingan strategis terkait politik dan hukum yaitu (Widayanto, 2016, pp. 4-13):

1. Hak Internasional atas Keterbukaan Ekonomi Pasar

UU No. 7 Tahun 1994 menyatakan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan diri untuk melakukan perdagangan multilateral dan berupaya untuk memperluas, meningkatkan, dan mengamankan kepentingan Indonesia untuk berdaya saing dalam perdagangan Internasional, dalam melakukan perdagangan internasional juga memegang prinsip akan berlaku adil untuk produk pasar terhadap mitra dagangnya. Dalam perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa Indonesia berhak dalam memanfaatkan pasar dalam melakukan investasi, memiliki hak dalam mengisi pasar bagi sesama anggota WTO, dan memiliki hak dalam memanfaatkan sumberdaya negara pendatang untuk sumber kebutuhan ekspor.

2. Hak Melindungi Bangsa dari Ekses Negatif Perdagangan

Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan Indonesia mampu membuat UU maupun kebijakan yang dapat melindungi negaranya dari kerjasama yang dilakukan dengan negara sesama anggota seperti perlindungan terhadap tarif dan non-tarif, dalam perlindungan tarif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengamankan keperluan domestik dengan memberikan pajak terhadap beberapa barang sehingga dalam melakukan perdagangan impor Indonesia bisa meniggikan pajak tersebut dan mampu menetapkan bea masuk lebih tinggi sehingga membuat barang-barang dari produk dalam negeri memiliki harga yang murah dan mampu bersaing dengan barang-barang dari luar negeri dan perlindungan

untuk melindungi dari akses negatif dan ketentuan dalam melindungi industri nasional dengan cara mengimplementasikan standar keselamatan atas produk yang akan di jual dalam perdagangan internasional. Peran pemerintah untuk menyeimbangkan antara ekspor dan impor yang saat ini terus meningkat yaitu melalui cara diversifikasi ekspor dan menjual produk yang memiliki nilai tambah, sehingga pemerintah menekankan bahwa akan meningkatkan ekspor dengan cara mengintervensi yang optimal di beberapa bidang termasuk otomotif, pemerintah juga berusaha dalam mengatur pajak di Indonesia sebab hingga saat ini pajak yang ada dirasa masih sangat lemah, dalam melakukan ekspor jumlah barang dan jasa harus di perbanyak sebab jika impor terlalu banyak maka produksi dalam negeri akan menurun dan mengganggu stabilitas perekonomian.

3. Diplomasi Perdagangan

Pemerintah harus memiliki strategi dalam membuat kepentingan dan kebijakan untuk melindungi, pemanfaatan hak, dan mengamankan negara dari sumber daya luar negeri serta menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, strategi pemerintah dalam melakukan diplomasi perdagangan terhadap politik luar negerinya bertujuan agar bisa memanfaatkan penunjang stabilitas terhadap pasar domestik dan luar negeri dan mendapatkan hukum yang jelas untuk menjaga perekonomian

negara dan mutu suatu produk melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Pemerintah telah membuat Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) untuk menjaga produk-produk ekspor Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan agar tetap membuka produk ekspor Indonesia ke negara lain. Tugas dari DPP tersebut memberikan langkah-langkah yang signifikan terhadap ekspor Indonesia di mana mereka pada umumnya membantu ekspor ke negara yang bermasalah dengan cara bernegosiasi dan melakukan kunjungan langsung ke negara terkait, pemerintah juga bekerja sama dalam membuat standarisasi untuk memperkuat ekspor produk Indonesia di kancah internasional (Perdagangan, 2019).

Pemerintah dalam regulasinya terhadap produk Indonesia memiliki standar Internasional dari segi keamanan, dan kualitas dengan cara terus melakukan inovasi, pengawasan, dan perbaikan secara terus menerus melalui organisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN). Di mana organisasi ini mewakili Indonesia dalam International Organization for Standardization (ISO) dalam mengatur standarisasi dunia terkait produk-produk umum seperti komponen otomotif dan memfasilitasi pasar internasional dalam produksi, manufaktur, dan pengembangan untuk menjamin keamanan suatu produk. Dalam hal ini standar yang ada di suatu negara juga harus wajib memiliki

standar yang menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu dalam mengatur standardisasi ini ISO telah bekerjasama dengan WTO dalam mengatur standar produk negara anggotanya, di tingkat ASEAN, BSN juga berperan aktif dalam mewakili Indonesia untuk melakukan kerjasama standardisasi seperti pada forum ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) untuk memperlancar kerjasama investasi dan perdagangannya dalam pengakuan standardisasi sehingga dapat menekan negara anggotanya untuk mengikuti kebijakan yang telah disepakati (BSN, 2017).

Pemerintah dengan negara lainnya juga perlu dalam menerapkan Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk industri otomotif Indonesia sehingga untuk wilayah ASEAN memiliki standar yang sama sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam menjalankan industri otomotif tanpa adanya uji tipe terus menerus. Pemerintah harus menekan kebijakan tersebut terhadap industri otomotif Indonesia sebab banyaknya mobil buatan Indonesia yang di ekspor ke luar negeri di mana dalam MRA tersebut terdapat sertifikasi dalam memastikan kualitas, perlindungan terhadap produk kendaraan, dan keamanannya (Mola, 2019). Upaya ini membuat aktor yang terlibat menyetujui standar yang telah di tetapkan sebab sangat tingginya persaingan dalam industri otomotif, tentunya Indonesia dalam permasalahan terhambatnya ekspor mobil

ke Vietnam yang terjadi sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan penjualannya.

Dengan demikian, negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi menjelaskan bagaimana pemerintah dan elit birokrasinya yang memiliki kewenangan dalam mengatur sektor-sektor yang ingin di tingkatkan termasuk bidang industri otomotif. Terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah adalah di dalam kebijakan pengembangan industri otomotif nasional serta dalam keikutsertaan di perdagangan internasional. Meski begitu, terdapat beberapa batasan kewenangan yang dimiliki, seperti pada perumusan kebijakan pengembangan industri otomotif domestik yang mana pemerintah tidak dapat memaksa secara langsung, namun melalui pemberian insentif serta penerapan pajak (*Tax Holiday, Tax Allowance, Super Deductible Tax*).

Pemerintah juga memiliki keterbatasan terhadap perdagangan internasional. Namun, di sini pemerintah masih dapat melakukan beberapa upaya seperti penyesuaian kebutuhan administratif domestik dengan standar internasional. Selain itu, pemerintah juga dapat mengirimkan delegasi untuk melakukan diplomasi perdagangan dengan negara lain, termasuk dalam kasus ini adalah Vietnam untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan yang muncul antar kedua negara.

Terkait kasus terhambatnya ekspor mobil Indonesia ke Vietnam kewenangan pemerintah dalam melindungi perdagangan internasional beserta

industri otomotifnya memiliki kompleksitas yang beragam. Di dalam negeri pemerintah yang terhubung dengan elit birokrasinya harus bisa memiliki keinginan yang kuat serta kerja sama yang optimal untuk bersama-sama dalam meningkatkan sektor unggulan yang ingin dipasarkan. Namun akses yang begitu sulit dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan, Presiden Joko Widodo banyak melakukan intervensi terhadap menteri-menteri yang bersangkutan. Dalam kerja sama bilateral antara Indonesia-Vietnam mengenai hambatan tersebut batasan wewenang pemerintah dalam melakukan diplomasi perdagangan dengan cara bernegosiasi dan mengikuti aturan dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti WTO, negosiasi yang dilakukan pemerintah merupakan cara yang terbaik untuk menjaga hubungan antar sesama negara dalam menjaga stabilitas perekonomian dan perjanjian perdagangan internasional.

Keterbatasan wewenang ini yang membuat pemerintah terus mempertahankan kebijakan untuk dapat menopang pertumbuhan serta intensif terhadap industri otomotif untuk bertransformasi menjadi industrialisasi sebab industri otomotif Indonesia sendiri masih berbasis komoditas dan bernilai tambah rendah. Intensif tersebut bertujuan untuk mempercepat reformasi struktural, sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, sehingga produk domestik mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Kebijakan seperti pajak dapat meningkatkan percepatan ekonomi dan stabilitas antara

ekspor-impor dan menarik investor, hal ini lah yang merupakan strategi untuk memperkuat daya saing guna menjadi basis produksi dalam memasok rantai nilai global, sehingga pemerintah mampu mendorong masyarakatnya termasuk pihak-pihak yang berwenang untuk terus bekerja sama dalam kebijakan yang ia keluarkan untuk meningkatkan industri otomotif Indonesia.

Terkait batasan kewenangan pemerintah dalam kebijakan pengembangan industri otomotif pada perdagangan internasional sangat menentukan bagaimana pemerintah dalam menjaga standar produk lokalnya agar bisa bersaing dengan produk-produk negara lain. Selain itu pemerintah yang telah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan membentuk badan standar produk seperti BSN, DPP, merupakan cara pemerintah dalam menjaga kualitas, keamanan, serta berdaya saing dengan negara lain terhadap produk-produknya dan mengedepankan daya saing yang bernilai tinggi dalam bentuk transfer teknologi, produksifitas, inovasi, dan integrasi ekonomi global sehingga menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif.

Dengan adanya keterangan di atas, pada bab 2 ini menjelaskan bagaimana *Developmental Elite* dapat terlihat bahwa kelompok elit birokrasi dan sektor swasta maupun organisasi memiliki kedekatan dengan sektor industri otomotif domestik. Oleh karenanya, pemerintah memiliki fokus lebih terhadap sektor ini. Hal ini dapat dilihat mulai dari Presiden Joko Widodo yang memiliki historis kedekatan dengan mobil ESEMKA, hingga beberapa menteri

yang memiliki relasi kuat dengan berbagai perusahaan otomotif nasional untuk meentukan arah kebijakan di industri otomotif. Meski begitu, di dalam menjalankan kebijakannya, elit pemerintahan juga terbentur dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki.

Di dalam kasus sengketa perdagangan dengan Vietnam, terlihat bahwa Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam menekan kebijakan yang ada di negara tersebut. Yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan mengirimkan delegasi untuk melakukan diplomasi perdagangan untuk membantu mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga produk otomotif Indonesia kembali dapat masuk ke pasar Vietnam.

Menteri yang merupakan delegasi untuk melakukan negosiasi atas perintah Presiden dalam melancarkan kerja sama bilateral antara Indonesia-Vietnam merupakan struktur dari terjalannya kerja sama dalam perdagangan internasional. Batasan ini menjelaskan bagaimana negara dalam menjaga hubungan terhadap perdagangan internasional, di mana pemerintah dan menteri-menterinya memiliki batasan tertentu untuk kewenangannya dalam meningkatkan produk-produk yang ada dalam pasar perdagangan internasional. Hal ini juga menjelaskan bagaimana pemerintah dan menteri-menterinya dalam melindungi industri-industri lokal memiliki batasan yang hanya dapat dilakukan dalam kewenangan suatu negara untuk dapat mendukung pasar di dalam perdagangan internasional maupun lingkup domestik.